



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2022



Jl. Gajah Mada No.10 Kel Pane Kec. Rasane
Barat Kota Bima - NTB

TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T . Kami sampaikan karena atas ijin Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2022 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk dari pengangkatan Status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bima oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bima yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, dengan melaksanakan 1 (Satu) Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi, berdasarkan SK Kepala Dpmptsp Nomor : 500.16 / 21 /DPMPTSP/I/2023 Tentang Penetapan Hasil Reviuw Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kota Bima.

Segala Upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi-misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dan LKIP 2022 adalah wujud dari pertanggung jawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2022 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2023
Kepala Dinas

H. Lalu Sukarsana, S.IP
Pembina Utama muda (IV/c)
Nip.196607041986081003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
2. KONDISI ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA	3
1. TUGAS	4
2. FUNGSI	4
C. ASPEK STRATEGIS ORGASASI	9
D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC YANG DIHADAPI	9
E. SUMBER DAYA	10
F. STRUKTUR ORGANISASI	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH (RENCANA STRATEGIS)....	14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	19
C. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
1. MEMBANDINGKAN ANTARA TERGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI	28
2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR	32
3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS NASIONAL	38
4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL	39



5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TE;AH DILAKUKAN	41
6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	42
7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN CAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	46
B. REALISASI ANGGARAN	51
BAB IV PENUTUP	57



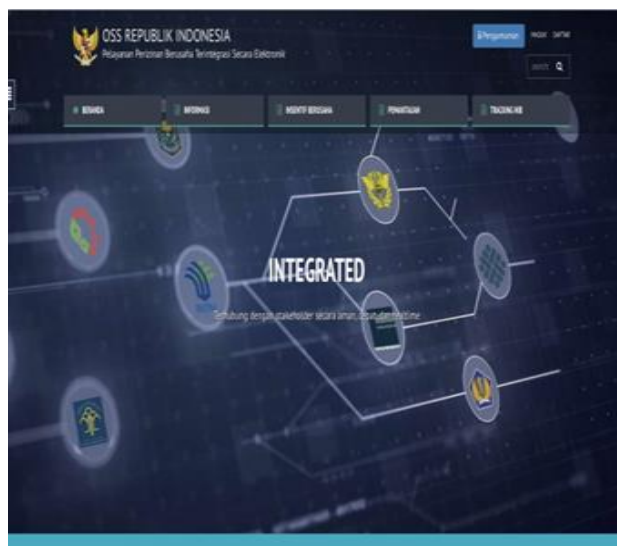
DAFTAR TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bima	12
Tabel. 1 data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselonering	12
Tabel. 2 Data Menurut Golongan/Ruang	13
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah DPMPTSP	14
Tabel 2.2 Tujuan, sasara, strategis, dan kebijakan	15
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra	19
Table 2.3 Perjanjian Kinerja	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	27
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2022	24
Table 3.1.1 tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja sasaran dari Hasil capaian indicator kinerja	28
Table 3.1.1.2. tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja berdasarkan Program dan kegiatan tahun 2022	29
Tabel.3.1.2 Evaluasi Keselarasan Dokumen Perencanaan & Penganggaran...	29
Tabel. 3.1.3 Pengukuran Kinerja IKM	32
Grafik 3.1.3.1.Realisasi IKM	34
Table 3.1.3.2 rekapitulasi pencapaian indicator kinerja utama untuk IKM	34
Tabel 3.1.3.4. Pengukuran Kinerja Porsentase Nilai Investasi	35
Tabel. 3.1.3.5 Rekapitulasi Nilai Investasi Pelaku usaha dikota bima	36
Grafik 3.1.3.6 Realisasi Nilai Investasi	36
Grafik 3.3.1.7 Rekapan Sebaran NIB Pada Aplikasi OSS Versi Berbasis Resiko.....	36
Grafik 3.3.1.8 Rekapan Realisai Investasi Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) kota bima	37
Tabel jumlah target dan realisasi LKPM standard nasional	41
Tabel 6.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	43
Tabel 6.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas program dan Kegiatan	43
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Eselon	45
Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Eselon II	46
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Eselon III	47
Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Eselon IV	48
Table 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021	41



Kota Bima

Bidang	Subbidang	Uraian	Dasar Hukum	Salah satu	Salah satu
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Pertanian	1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan	UU No. 18 Tahun 2013	1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan	1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan
		2. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	2. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	2. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		4. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	4. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	4. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		5. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	5. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	5. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
	Perikanan	6. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	6. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	6. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		7. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	7. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	7. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		8. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	8. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	8. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		9. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	9. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	9. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		10. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	10. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	10. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
Pertambangan	Pertambangan	11. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	11. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	11. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		12. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	12. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	12. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		13. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	13. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	13. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		14. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	14. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	14. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		15. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	15. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	15. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
	Pertambangan	16. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	16. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	16. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		17. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	17. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	17. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		18. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	18. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	18. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		19. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	19. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	19. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan
		20. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	UU No. 18 Tahun 2013	20. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan	20. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perikanan



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713), yang mempunyai Tugas kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana pada visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pada Renstra 2018-2023.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta Renja sesuai dengan Perubahan Renstra 2014-2018 (Renstra Tahun kedua), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM atau Kementerian Investasi.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target,

capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan kepada pemerintah daerah (Walikota).

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai Sebagai salah satu pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari laporan kinerja instansi pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi. sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

2. Kondisi organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu .

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdapat peraturan walikota bima nomor 76 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bima.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
 - d. pengelolaan urusan ASN; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
- c. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional

Substansi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang berjenjang tertinggi dan senioritas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang berjenjang tertinggi dan senioritas.

Unit Pelaksana Teknis

- a. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

- b. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi promosi dan penggalian potensi, pengendalian, perizinan dan melakukan kajian untuk regulasi-regulasi yang berkaitan dengan paket insentif dan kemudahan berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila dimulai dengan perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang berupa Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Bima.
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal karena belum semua investor membuat laporan LKPM Melalui Kepala DPMPTSP dan LKPM secara online.
3. Rasio daya serap tenaga kerja yang ada dikota Bima
4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).
5. Online single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan sistem pelayanan perizinan secara online.
7. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

E. SUMBER DAYA

Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kota Bima terletak di Jalan Gajah Mada No.10, Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan, ruang pelayanan dan ruang kantor yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota bima.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
2. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan I nternet, dan mesin faksimili;

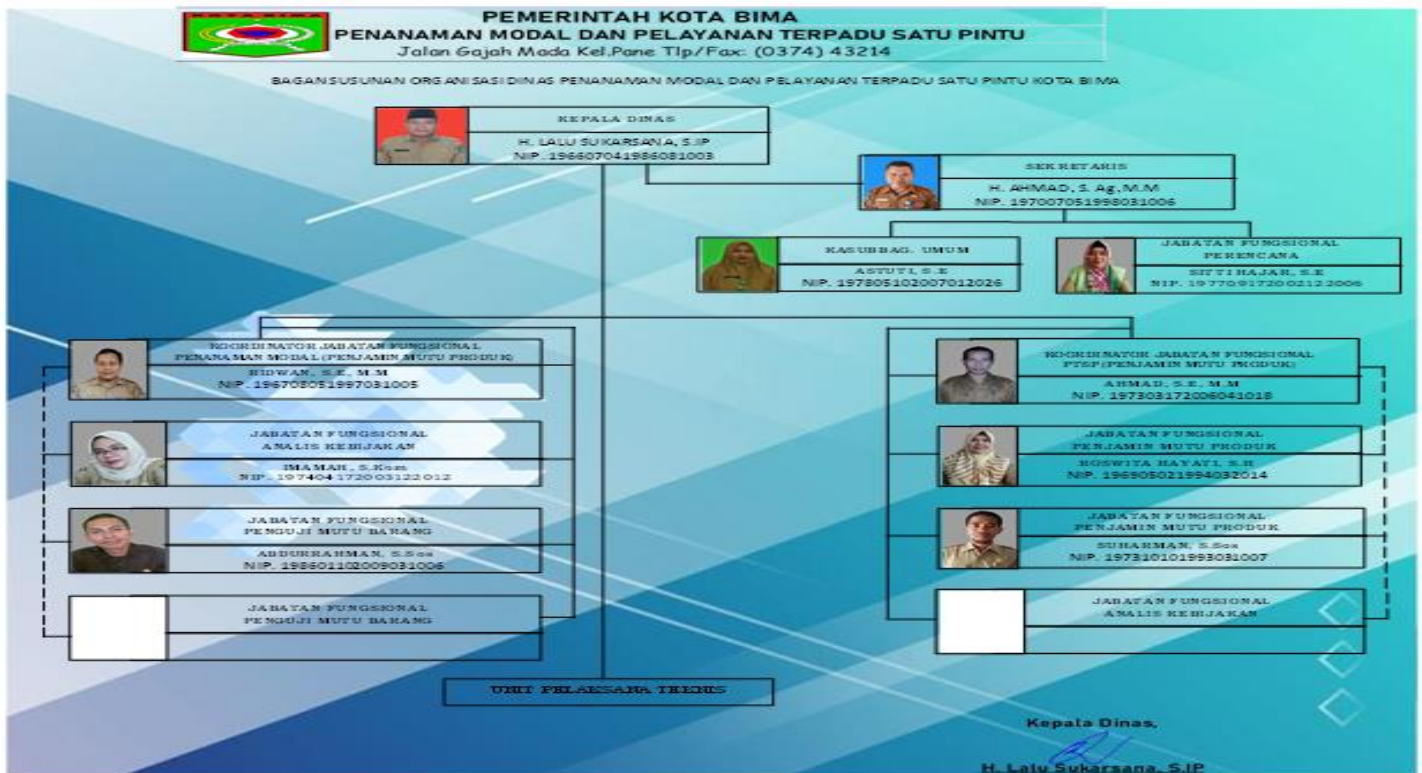
3. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
4. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
5. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin, dan televisi;
6. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.
- d. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP KOTA BIMA.



Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Desember 2022 adalah sebanyak 25 Orang Pegawai dan 10 Orang tenaga Kontrak.

Pegawai berdasarkan kedudukan dalam organisasi

1. Menurut Jabatan/Eselon

Tabel 1. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	3	0	1	0	3
2	Eselon III	0	0	18	0	18
3	Eselon IV	0	0	0	4	4
4	Non Eselon	3	0	0	0	0
	Jumlah					25

2. Menurut Golongan/Ruang

Tabel.2 Data Menurut Golongan/Ruang

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	0	0	0	3	3
2	S1	0	0	18	0	18
3	D3/D2/D1	0	0	0	0	0
4	SMA	0	4	0	0	4
5	SMP	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	4	18	3	25

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH (RENCANA STRATEGIS)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan VISI Pemerintah Kota Bima : “ Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri. Dengan VISI Dpmptsp Kota Bima “ Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Unggul. Berikut keterkaitan antara RPJMD dan Indikator kinerja pemerintah dengan Indikator Dpmptsp Kota Bima, dengan tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bima

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja tujuan dan sasaran	Kondisi awal kinerja		Target capaian					Kondisi akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Rata-Rata Skor IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83,64	84	85	86	87	88	88
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)		10%	10% Rp. 135.2430 50211	10% Rp. 1379479 11215	10% Rp. 1407068 69439	10% Rp. 1435210 06828	10% Rp. 188071 397742	10%

Arah Kebijakan

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Namun demikian pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bima juga mengacu kepada hasil meningkatnyakualitas pelayanan public serta meningkatnya nilai investasi kota bima, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. rencana dan program pembangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima terhadap berbagai aspek dan komponen Pelayanan Publik untuk kemudian diintegrasikan dengan visi, misi kepala daerah.

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Misi	Sasaran	Strategis	Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Peningkatan cakupan pendaftaran pelayanan perijinan penanaman modal serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public				
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	terwujudnya pertumbuhan investasi	Peningkatan persentase nilai investasi terhadap jumlah investor kota bima 10% tiap tahunnya.				

Program/Kegiatan

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Penanaman modal dan PTSP Tahun 2022

	DINAS PENANAMAN MODAL	3.767.411.280,00
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.799.800,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.767.600,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.419.200,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.007.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.074.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.668.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.245.400,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.618.600,00
b.	Administrasi Keuangan	2.694.135.540,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.567.751.240,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	122.400.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.548.300,00
4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.436.000,00
c.	Administrasi Umum	118.644.500,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	878.900,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.822.000,00

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.587.600,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.356.000,00
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.060.000,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.060.000,00
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.996.240,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.783.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.213.240,00
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.103.300,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.723.300,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.760.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.620.000,00
B. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
g.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00
C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
h.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	35.514.000,00
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.514.000,00
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	130.183.500,00

3	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.183.500,00
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	85.681.000,00
4	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	14.206.000,00
D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00
2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	398.133.000,00
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	398.133.000,00
E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
j.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	275.193.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	122.940.000,00



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP . Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023.

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bima Nomor 500.16 / 21 /Dpmptsp/1/2023 Tentang Penetapan Hasil

Reviu Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Penanaman Modal Dan Ptspt Kota Bima

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Laporan Kepuasan Masyarakat	Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	Kepala Dinas
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	(Laporan Realisasi Investasi)	untuk memperoleh persentase peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA sebagai berikut : $= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi thn N} - \text{Jumlah Ralisasi Investasi thn N-1}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi tahun N-1}} \times 100 \%$	Kepala Dinas



C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabilitas dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai tahun 2022.

Penetapan Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi dalam akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022 Sebagai wujud penilaian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah, Penetapan Kinerja Merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan seluruh aparat DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelola program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2022 mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKPD) tahun 2018, dokumen rencana strategis tahun 2018-2023, dokumen Rencana kerja (RENJA) DPMPTSP tahun 2022 dan DPA DPMPTSP Tahun 2022. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang ada.

1. Kepala Dinas

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,86
	2. Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	10% 143.521.006.828

2. Sekretaris

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen
2. Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	2. Jumlah Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	2 Dokumen
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	3. Porsentase Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100%
4. Meningkatnya kualitas Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	4. Jumlah Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Jenis
5. Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	5. Jumlah penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	2 Unit
6. Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	6. Jumlah pemeliharaan Barang milik daerah	15 Unit

a. Perencana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3

1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan

b. Kasubag Umum

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1		2	3
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan



3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Unit
7	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Dokumen
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51 kali
10	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 UNIT
11	terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

3. Koordinator PM Penjamin Muta Produk

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	1. Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100 %
2. Meningkatnya penerima fasilitas insentif	2. Porsentase peningkatan nilai investasi	100 %
3. Meningkatnya kerjasama investasi	3. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100 %
4. Meningkatnya Realisasi Investasi	4. Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 %

a. Analisis Kebijakan

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen
2. Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen

b. Penguji Mutu Barang

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Tersusunnya Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2. Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2. Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen

3	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1 Dokumen
4	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	4	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku usaha
5	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	5	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan usaha

4. Koordinator PTSP Penjamin Mutu Produk

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	1.	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%

a. Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1.	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%
2.	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	2.	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku usaha

b. Jabatan Fungsional penjamin mutu Produk

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1.	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000 Kegiatan usaha



c. Plt. Panjamin Mutu Produk Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1. Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Bahwa pada Tahun 2022 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1(satu) sasaran dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja

Utama dengan rata-rata pencapaian diatas 99%, dimana dari sasaran masuk kategori Sangat Tinggi (Berhasil).

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realsasi capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil Program)	Indikator Kinerja	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	98 %
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	130

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TERGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Bahwa pada Tahun 2022 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 (Satu) sasaran dimana sasaran tersebut masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.1.1. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2022

N o	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil Program)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,86	87,12	98 %
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	143.521.006,82 8	186.220.708,49 9	130 %



Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih rinci terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari capaian indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2022, berikut disajikan dalam tabel :

Tabel. 3.1.1.2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Targ et	Realis asi	Program/Sub. Kegiatan	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,86	87,12	Program Pelayanan penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	3.800 Pelaku Usaha	253 %
							Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000 kegiatan usaha	305 kegiatan usaha	30 %



							Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi insentif daerah	0	0	0
							Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 orang	29 Orang	97 %
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	10 % Rp. 143.5 21.00 6.828	130 % Rp. 186.22 0.708.4 99	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam	Dokumen	0	0



					menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	Kegiatan usaha	0	10	
					Pembuatan peta Potensi Inovasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana umum Penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	
						Penyediaan Peta Potensi dan peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	0	0	0	



							Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	0	0	0
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan usaha		Tidak ada dalam Juknis DAK
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku usaha	210 Pelaku Usaha	100 %
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 kegiatan usaha	36 kegiatan Usaha	277 %

Dari Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022, ada beberapa program/ kegiatan yang tidak mencapai target 100% yakni pada kegiatan sebagai berikut :



1. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu dari target 30 orang tetapi yang terealisasi hanya 29 orang dengan capaian kinerja sebesar 97 %, hal ini terjadi karna tidaknya adanya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun keluhan terhadap masyarakat akan dampak kegiatan usaha.
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal dari target 1000 Kegiatan Usaha yang terealisasi hanya 305 Kegiatan Usaha, dengan ketidak capaian sebesar 695 kegiatan izin usaha, ini dikarenakan karna adanya pergantian ada perubahan peraturan terkait aplikasi OSS, yang awalnya memakai aplikasi OSS Versi 1.1 Yang masih berlaku system pemenuhan komitmen untuk kegiatan berusaha, sekarang menggunakan OSS Berbasis risiko dimana sudah tidak adanya lagi nama izin usaha melainkan izin yang diterbitkan berdasarkan tingkat risiko dari pada kegiatan usaha yang dipilih oleh pelaku usaha sendiri. Terkait hal ini menyebabkan pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menjadi banyak dalam merealisasikan jumlah izinnnya.

3. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “Skor Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) ” dengan indikator sasaran :

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

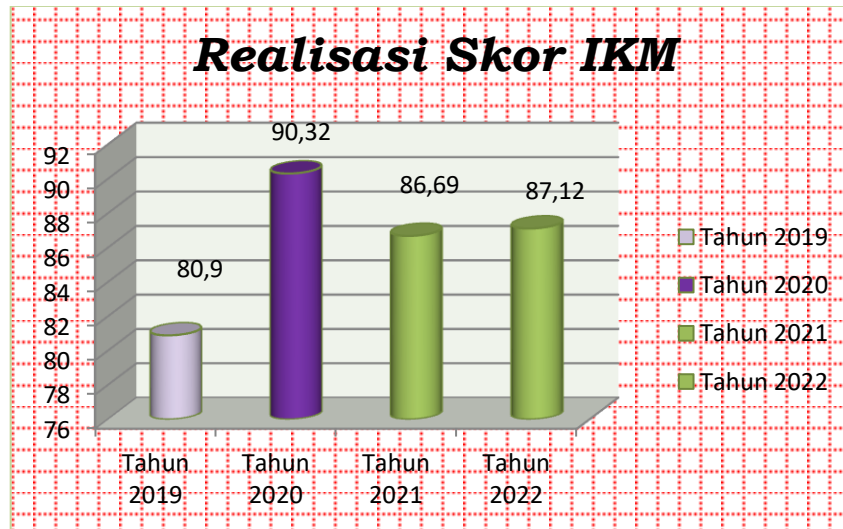
Tabel. 3.1.3 Pengukuran Kinerja IKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 \times 100$	7	8	$9 = 8/7 \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan)	86,00	86,69	100,8 %	88,86	87,12	98 %

Capaian kinerja IKM ditahun 2022 ditargetkan dengan Skor 88,86 dan terealisasi dengan Skor 87,12 atau sebesar 98 % Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2022 ternilai Tinggi karena mencapai angka 98 %, Jika dilihat dari capaian IKM dari dua tahun yang lalu, dapat dilihat memiliki variasi nilai yang berbeda-beda, karena tergantung dari penilain yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP. Untuk dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



3.1.3.1 Dapat digambarkan dengan Grafik Realisasi IKM sebagai berikut :



Untuk mengetahui skala pencapaian Nilai IKM, berikut ditampilkan skala Nilai persepsi, Interval IKM, Intervasi Konvesri IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit PTSP.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

NILAI IKM			PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
87,12			RESPONDEN	
			JUMLAH : 200 ORANG UMUR : 18 S/D 40 TAHUN = 98 ORANG > 40 TAHUN = 90 ORANG TIDAK MENCANTUMKAN UMUR = 12 ORANG JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI = 129 ORANG PEREMPUAN = 71 ORANG TIDAK MENYEBUTKAN JENIS KEL. = 0 ORG PENDIDIKAN : SD = 1 ORANG SMP = 3 ORANG SMA = 88 ORANG S1 = 97 ORANG S2 = 8 ORANG S3 = 0 ORANG TIDAK MENCANTUMKAN PEND = 3 ORANG PEKERJAAN : PNS = 18 ORANG TNI = 0 ORANG POLRI = 0 ORANG SWASTA = 69 ORANG WIRUSAHA = 101 ORANG LAINNYA = 5 ORANG TIDAK MENCANTUMKAN PEKERJAAN = 7 ORANG Periode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5 JANUARI s/d 30 DESEMBER 2022 Periode Penyusunan	
No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA		
U1	Persyaratan	3,46		
U2	Prosedur	3,46		
U3	Waktu Pelayanan	3,48		
U4	Biaya/Tarif	3,86		
	Produk Layanan	3,34		

U5		
U6	Kompetensi Pelaksana	3,53
U7	Perilaku Pelaksana	3,46
U8	Sarana dan Prasarana	3,36
U9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,76

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN,
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KERJA KAMI
AGAR DAPAT TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN KAMI KEPADA MASYARAKAT**

Pelayanan pada tabel. 3.1.3.2 berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Jika dilihat dengan Pencapaian IKM Dpmptsp tahun 2022 bahwa **"BAIK"** yakni dengan Skor 87,12 , atau dapat disajikan dengan tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2.3. Rekapitulasi pencapaian Indikator Utama Untuk IKM

No	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	3,52	87,12	B	BAIK

Selain dari IKM , faktor pendukung yang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan investasi adalah perizinan dan investasi, yang akan membahas penyebaran data pelaku usaha yang sudah mendaftarkan perusahaannya pada aplikasi Online single submission, dapat dilihat dari data NIB serta nilai investasi usaha tersebut.

b. Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan “dengan indikator sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah (realisasi Investasi) :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Inves PMDN/PMA tahun N} - \text{Jumlah Realisasi Nilai Inv tahun N-1} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi Invest tahun N-1}}$$

Tabel. 3.1.3.4 Pengukuran Meningkatnya Investasi Daerah (realisasi Investasi)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9=8/7*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Investasi Daerah (realisasi Investasi)	Rp.140.706.869.439	Rp.115.380.536.100	210%	Rp.143.521.0068.280	Rp.186.220.708.499	130%

BERIKUT DATA NILAI INVESTASI TAHUN 2018, 2019 DAN TAHUN 2020,2022 BERDASARKAN NILAI INVESTASI PELAKU USAHA YANG ADA DIKOTA BIMA

Tabel. 3.1.3.5. Rekapitulasi nilai Investasi Pelaku usaha dikota Bima

No	Jumlah Nilai Investasi tiap Bulan nya	Tahun 2018 Dalam (Rp)	Tahun 2019 Dalm (Rp)	Tahun 2020 Dalam (Rp)	Tahun 2021 dalam (Rp)	Tahun 2022 Dalam (Rp)
1	Januari	1.324.200.000	5.634.000.000	14.187.000.000	1.010.311.000.000	10.996.000.000
2	Februari	6.703.000.000	25.363.000.000	12.230.000.000	14.055.000.000	13.940.000.000
3	Maret	7.972.500.000	11.786.000.000	18.707.000.000	33.353.891.000	12.007.700.000
4	April	6.685.000.000	15.515.000.000	12.322.770.806	18.656.290.200	11.723.885.403
5	Mei	8.480.000.000	12.214.000.000	5.250.000.000	5.045.000.000	9.560.000.000
6	Juni	3.503.000.000	32.801.891.000	40.405.000.001	10.850.000.000	16.875.000.000
7	Juli	7.852.000.000	6.670.000.000	117.034.000.000	6.570.000.000	17.450.000.000
8	Agustus	7.705.000.000	16.790.000.000	10.980.000.000	2.812.000.000	9.320.000.000
9	September	4.709.000.000	24.202.093.278	8.940.000.000	5.295.000.000	10.794.000.000
10	Oktober	41.702.500.000	26.925.000.000	13.141.000.000	5.380.000.000	7.722.000.000
11	November	63.410.397.742	19.025.500.000	34.382.000.000	3.800.000.000	7.231.000.000
12	Desember	16.841.800.000	24.960.093.278	4.835.500.000	5.098.000.000	58.719.123.996
	Jumlah Total Investasi	176.888.397.742	221.886.577.556	292.414.270.807	1.121.226.181.200	186.338.709.399

Sumber data laporan perizinan DPMPTSP

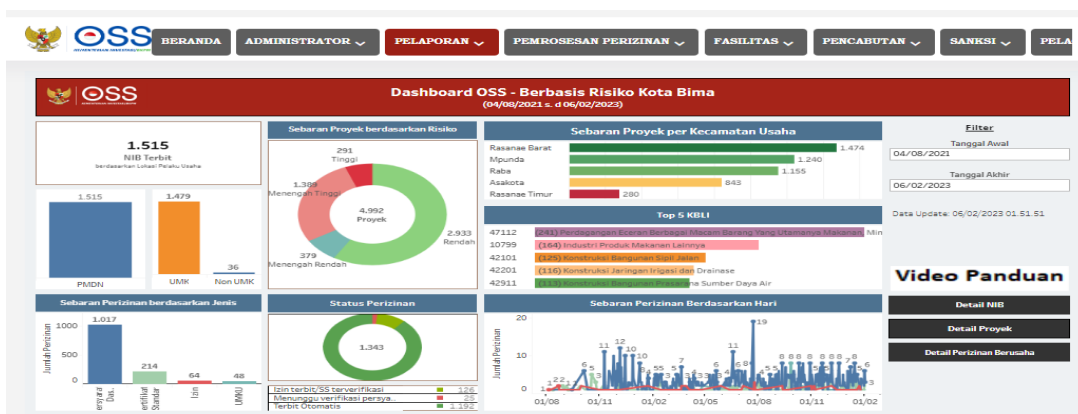
1.1.3.6 Berikut disajikan Grafik Realisasi Nilai investasi :



Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai investasi selalu berbarengan dengan jumlah investor yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut, berbagai macam jenis usaha yang telah terangkum dalam database aplikasi OSS, beserta lokasi usaha tersebut , lebih jelasnya akan ditampilkan dalam gambar dibawah ini :

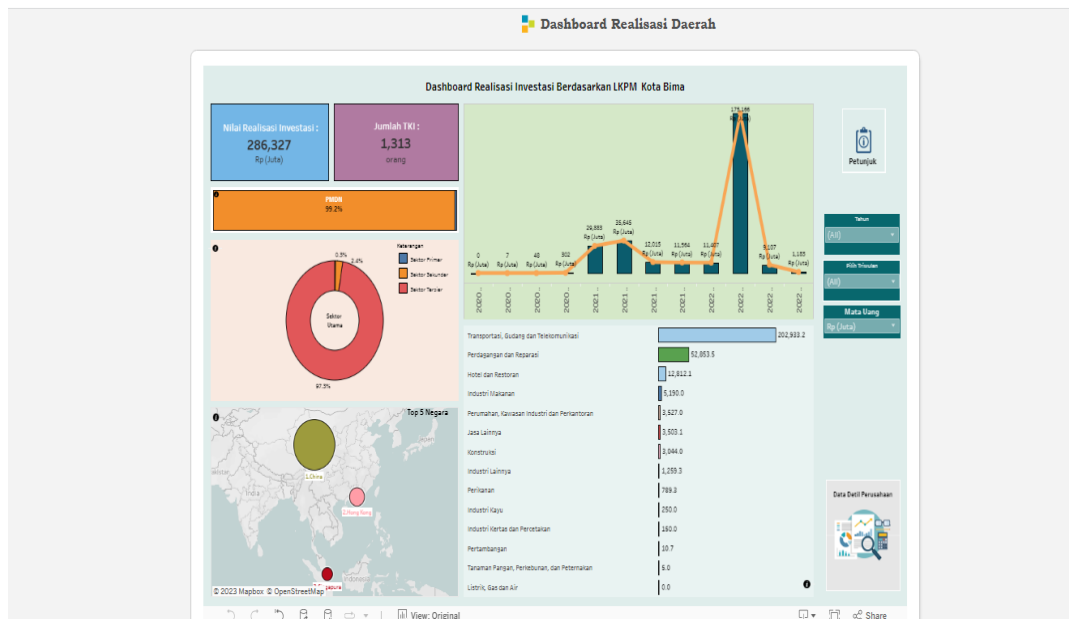
Data yang ditampilkan pada aplikasi OSS Veris 1.1 dan Aplikasi Onlines Single submission mengikuti perubahan versi yakni dari versi 1.1 menjadi OSS-RBA (Berdasarkan resiko) mulai agustus 2021 sesuai dengan UU No.10 tentang Cipta Kerja , jadi data yang kami tampilkan dari Agustus 2021 sebagai berikut :

2.3.1.7 Rekapitulasi Sebaran NIB , Sertifikat standar terbit otomatis, Sertifikat standar diverifikasi dan Izin yang diverifikasi oleh OPD teknis Pada Aplikasi OSS Versi Berbasis Resiko sebagai berikut :





3.3.1.8 Rekap Realisasi Investasi Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) kota bima :



Sumber : <https://nswi.bkpm.go.id/Dpmptsp Kotabima>

Realisasi tersebut dicapai melalui 5 program dan 7 kegiatan pada DAU dan DAK antara lain :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan realisasi sebesar 130% , terdiri dari :
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan realisasi sebanyak 3.800 lembar izin dengan capaian sebesar 253 %.
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan realisasi sebanyak 305 lembar izin usaha/Non Usaha dengan capaian 30 %.
 - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadudengan realisasi 29 orang terselesainya semua masalah pengaduan masyarakat dengan capaian 97%

2. Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman Modal
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan realisasi sebanyak 1 dokumen realisasi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan realisasi 1 dokumen terkait Pnyediaan peta potensi dan peluang usaha.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal dengan Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) realisasi sebanyak 114 %
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi sebanyak 240 perusahaan/orang/peserta pelaku usaha yang menghadiri atas sosialisai LKPM.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi sebanyak 14 Dokumen BAP perusahaan yang diawasi terkait realisasi kegiatan usahanya.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS NASIONAL.

Adapun data pendukung terkait evaluasi keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran capaian kinerja pada indikator persentase perencanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang sesuai



dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2022 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.12. Evaluasi Keselaraan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Program/Kegiatan	Prognas 2022	ProgProv 2022	RPJMD 2023	RKPD 2022	KUA/PPAS 2020	RENSTRA 2020-2023	Renja 2022	RKT 2022	DPA/DPPA 2022	PK/Reviu 2022
URUSAN BERSAMA											
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN PENANAMAN MODAL											
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN PERIZINAN											
5.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN INFORMASI DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN											
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

5. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL.

Dinas Penanaman modal dan PTSP, memiliki realisasi kinerja berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan BKPM No.5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Yang akrab kita dengar yaitu LKPM (Laporan Kegiatan penanaman Moda). Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/operasi komersial maupun yang sudah, yang mencakup realisasi



Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha secara daring melalui subsistem Pengawasan pada sistem OSS.

Periode Pelaporan LKPM Adalah sebagai berikut :

- Bagi Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester) :
Semester I : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
Semester II : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya
- Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar, LKPM disampaikan setiap 3 bulan (triwulan) :
 - Triwulan I : Pelaporan tanggal 1-10 April
 - Triwulan II : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
 - Triwulan III : Pelaporan tanggal 1-10 Oktober
 - Triwulan IV : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya

Dari hasil pelaporan yang dilakukan para pelaku usaha atau investor, memiliki realisasi investasi, dan Nilai realisasi investasi tersebut memiliki target dari BKPM / Kementerian Investasi untuk mengukur realisasi Kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP terkait pengawasan, pemantaun pada pelaku usaha/investor.



Berikut target dan realisasi capaian LKPM DPMPTSP kota bima, berdasarkan target dari BKPM

Jumlah Target Dan Realisasi Investasi Kota Bima Tahun 2019-2022 Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Lkpm)

Target/Realisasi	Tahun										Keterangan
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	Jumlah	%	
Target	65.050.913.516	258	281.426.257.002	71	20.106.558.639	475	119.771.847.405	202	486.355.577.367	145	
Realisasi	167.914.197.701		200.748.665.618		95.584.922.015		241.731.055.380		705.978.840.714		

6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Dari Sasaran strategis dan indikator kinerja utama DPMPTSP kota bima, berikut penjelasan terkait keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Kegagalan :

Capaian kinerja IKM ditahun 2022 ditargetkan dengan Skor 88,86 dan terealisasi dengan Skor 87,12 atau sebesar 98 % Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2022 ternilai Tinggi karena mencapai angka 98 %, Jika dilihat dari capaian IKM dari dua tahun yang lalu, dapat dilihat memiliki variasi nilai yang berbeda-beda, karena tergantung dari penilain yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP.

Alternative /solusi yang dilakukan :

Lebih ditingkatkan lagi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dapat nilai dari sembilan unsur pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan.

2. Meningkatnya Investasi Daerah (realisasi Investasi)

Keberhasilan :

Capaian kinerja untuk meningkatnya investasi Daerah (Realisasi Investasi) dari tahun 2021 sampai tahun 2022 selalu mencapai target 100% dari yang ditentukan, hal ini berpengaruh banyak pelaku usaha yang memiliki usaha baru serta memperpanjang izin usaha yang sebelumnya.

7. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari setiap indikator kinerja terhadap sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator-indikator tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh sejumlah indikator yang realisasinya lebih dari atau sama dengan 100%, sehingga dapat diperhitungkan bahwa Capaian Kinerja dikatakan efisien apabila realisasi program lebih kecil dibanding realisasi kinerja.

Untuk mencapai target tiga indikator yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mengalokasikan belanja langsung tahun 2021 sebesar Rp 3.950.264.438,00-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 3.792.740.156,00- atau 96,01 %. Dengan tingkat capaian rata-rata indikator Sasaran Strategis Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima sebesar 114 % hal tersebut menunjukkan bahwa



Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima telah melakukan capaian kinerja secara efisien Sangat Tinggi (berhasil) dengan capaian diatas 100%.

Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 6.1
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran			% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2			3	4	5 (4:3)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	130	95,87	74 %
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	122	100	82 %
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan	97	99,62	103 %
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100	99,96	100 %
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100	100	100%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	114	90,89	80%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	213	98,67	46%

. Tabel . 6.2

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya beserta program/kegiatannya

NO	Sasaran			% Capaian Penyerapan Kinerja	% Capaian penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)			-3	(4)	5(4:3)
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
			DINAS PENANAMAN MODAL			
			A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
a.			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	99.93	99%
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100,00
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	100,00
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	100	100,00
4			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	100	100,00
5			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	100	100,00
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100,00
7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	99.54	99,54
b.			Administrasi Keuangan	100	95.71	95.71
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100		96.07
2			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100		87.75
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100	100	100,00
4			Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	100,00
c.			Administrasi Umum	100	99.48	99.48
1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	100,00



2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100,00
3			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	100,00
4			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100,00
5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99.27	99.27
d.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100,00
1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100,00
e.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97.33	97.33
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100,00
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	90.69	90.69
f.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	98	98,00
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100,00
2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100,00
3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	-	
			B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100	100	100,00
g.			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100	100	100,00
1			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100	100	100,00
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	130	97.11	97.11
h.			Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130	97.11	97,11
1			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	130	95.87	95.87
2			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	122	100	100,00
3			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	97	99.62	96.62

4			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0%	-	
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100	93.29	93.29
i.			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	100	93.29	93.29
1			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	-	
2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	114%	90.89	90,89
3			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	213	98.67	98.67
			E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100	99.96	99.96
j.			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	100	99.96	99.96
1			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	99.96	100

8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN CAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Dapat disajikan dalam tabel Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV :

Tabel 3.2.1. Capaian Kinerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capain (%)					Ket
					2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	I. Rata-rata IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86,00	86,68	94,59%	102 %	112 %	-	-	Berhasil
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	II. Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	10 %	32%	236,3%	254 %	318 %	-	-	Berhasil
		III. Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA	-	-	128%	286 %	-	-	-	Berhasil

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan investasi	-	-	-	-	-	100,80 %		Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,86	87,12	-	-	-	-	98 %	Berhasil
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	Rp. 143.521.006,828	Rp. 186.220.708,499	-	-	-	-	130 %	Berhasil

3.2.2 Capaian Kinerja Eselon III

a. Sekretris

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
						2022	
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	2	Jumlah Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	2 Dokumen	2 Dokuemn	100 %	Berhasil
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	3	Porsentase Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100%	100 %	100 %	Berhasil
4	Meningkatnya kualitas Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	4	Jumlah Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Jenis	12 Jenis	100 %	Berhasil
5	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	5	Jumlah penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	2 Unit	2 Unit	100 %	Berhasil
6	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	6	Jumlah pemeliharaan Barang milik daerah	15 Unit	15 Unit	100 %	Berhasil

b.. koordinator jabatan fungsional Penanaman Modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6



1.	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	1.	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	Berhasil
2	Meningkatnya penerima fasilitas insentif	2	Porsentase peningkatan nilai investasi	100 %	100 %	100 %	Berhasil
3	Meningkatnya kerjasama investasi	3	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100 %	100 %	100 %	Berhasil
4	Meningkatnya Realisasi Investasi	4	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 %	100 %	100 %	Berhasil

c. Koordinator Jabatan Fungsional PTSP

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Ket
1		2		3			
1.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	1.	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%	100 %	100 %	Berhasil

3.2.3. Capaian Kinerja Jabatan Fungsional

a. Perencana

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Ket
1		2		3			
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Berhasil
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Berhasil



7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Berhasil
---	---	---	--	-----------	-----------	-------	----------

b. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1		2	3			
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	50 orang/bulan	100 %	Berhasil
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 Bulan	100 %	Berhasil
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	12 Jenis	100 %	Berhasil
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100 %	Berhasil
7	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	100 %	Berhasil
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51 kali	51 kali	100 %	Berhasil
10	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 UNIT	3 UNIT	100 %	Berhasil



11	terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100 %	Berhasil
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	100 %	Berhasil
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	100 %	Berhasil
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	100 %	Berhasil
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100 %	Berhasil

d. Analisis kebijakan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3			
1. Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil

e. Penguji Mutu Barang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3			
1. Tersusunnya Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
2. Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2. Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
3. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	3. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku usaha	240 Pelaku usaha	114 %	Berhasil
4. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	4. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan usaha	30 Kegiatan usaha	231 %	Berhasil

e. Penjamin Mutu Produk

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
2 Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	2. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 lembar izin	3.800 lembar izin	258 %	Berhasil

f. Jabatan Fungsional penjamin mutu Produk

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
1. Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000 Kegiatan usaha	305 Kegiatan Usaha	30 %	Tidak Berhasil krn adanya perubahan peraturan dalam penerbitan izin usaha

g. Plt. Panjamin Mutu Produk Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
1. Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1. Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 Orang	29 Orang	97 %	Berhasil

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2022, kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.950.264.438,00- dengan realisasi sebesar Rp. 3.792.740.156,00- atau 96,01 %.

Adapun realisasi Belanja Langsung tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022



**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPMPTSP KOTA BIMA
TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	PERSENTAS E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.950.264.438,00	3.792.740.156,00	157.524.282,00	96,01
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.950.264.438,00	3.792.740.156,00	157.524.282,00	96,01
	DINAS PENANAMAN MODAL	3.950.264.438,00	3.792.740.156,00	157.524.282,00	96,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		3.312.620.538,00	3.186.510.796,00	126.109.742,00	96,19
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.674.400,00	45.641.400,00	33.000,00	99,93
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.767.600,00	6.767.600,00	-	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.419.200,00	2.419.200,00	-	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.246.000,00	7.246.000,00	-	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.074.000,00	2.074.000,00	-	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.574.900,00	7.574.900,00	-	100,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.441.100,00	12.441.100,00	-	100,00
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.151.600,00	7.118.600,00	33.000,00	99,54
.	Administrasi Keuangan	2.776.988.698,00	2.657.875.816,00	119.112.882,00	95,71
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.604.398,00	2.546.491.516,00	104.112.882,00	96,07
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	122.400.000,00	107.400.000,00	15.000.000,00	87,75
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.548.300,00	1.548.300,00	-	100,00



4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.436.000,00	2.436.000,00	-	100,00
c.	Administrasi Umum	191.572.800,00	190.578.419,00	994.381,00	99,48
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	878.900,00	878.900,00	-	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.550.000,00	33.550.000,00	-	100,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.550.400,00	12.550.400,00	-	100,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.715.500,00	7.715.500,00	-	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.878.000,00	135.883.619,00	994.381,00	99,27
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.010.000,00	26.010.000,00	-	100,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.010.000,00	26.010.000,00	-	100,00
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.834.840,00	142.920.649,00	3.914.191,00	97,33
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.783.000,00	104.783.000,00	-	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.051.840,00	38.137.649,00	3.914.191,00	90,69
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.539.800,00	123.484.512,00	2.055.288,00	98,36
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.399.800,00	28.844.612,00	1.555.188,00	94,88
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.510.000,00	7.510.000,00	-	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.630.000,00	87.129.900,00	500.100,00	99,43
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	-	0
g.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	-	-	0
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	35.514.000,00	35.514.000,00	-	100,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		35.514.000,00	35.514.000,00		100 -

h.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.514.000,00	35.514.000,00	-	100,00
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	162.155.500,00	157.464.160,00	4.691.340,00	97,11
2	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	162.155.500,00	157.464.160,00	4.691.340,00	97,11
3	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	110.663.000,00	106.090.500,00	4.572.500,00	95,87
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	20.530.000,00	20.530.000,00	-	100,00
4	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	30.962.500,00	30.843.660,00	118.840,00	99,62
i.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	-	-	00
1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	398.133.000,00	371.427.800,00	26.705.200,00	93,29
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	398.133.000,00	371.427.800,00	26.705.200,00	93,29
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00	-	-	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	275.193.000,00	250.122.800,00	25.070.200,00	90,89
j.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	122.940.000,00	121.305.000,00	1.635.000,00	98,67
1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	41.841.400,00	41.823.400,00	18.000,00	99,96
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	41.841.400,00	41.823.400,00	18.000,00	99,96
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	41.841.400,00	41.823.400,00	18.000,00	99,96

Dari tabel diatas sebagai mana tertera di atas dapat dijelaskan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi atau program prioritas DPMPTSP adalah sebesar Rp. 637.643.900,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, sub kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 35.514.000,-
- b. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL dengan Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatann terbagi tiga sebagai berikut :
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik total anggaran Rp. 110.663.000,-
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal total anggaran Rp. 20.530.000,-
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Rp. 30.962.500,-
- c. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota, dan sub kegiatan terbagi tiga sebagai berikut :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal total anggaran Rp. 271.903.000,-



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal total anggaran Rp. 126.514.000,-

- d. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik total anggaran Rp. 41.841.400,-



BAB IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

LKIP bagi Dinas PMPTSP Kota Bima juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kota Bima, dalam masa-masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kota Bima baik terhadap Walikota maupun kepada seluruh masyarakat Kota Bima.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2022), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas PMPTSP Kota Bima pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena 1 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas



PMPTSP Kota Bima untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas PMPTSP Kota Bima ke depan.

Pertama, sasaran pertama IKU DPMPPTSP Kota Bima telah mencapai target yang sangat baik yaitu IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan Investasi, walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan menurunnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Bima, namun target masih bisa tercapai.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kota Bima dan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kota Bima akan meningkat.

Ketiga, meningkatkan sosialisasi perubahan kebijakan secara terpadu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat cepat menerima informasi terkait dengan perubahan kebijakan dari pemerintah.

Keempat, masih lemahnya koordinasi Dinas PMPTSP dengan Kabupaten/Kota dan PD/Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas PMPTSP Kota Bima dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun juga dengan PD/Dinas Teknis,



dan berharap dengan adanya aplikasi Online Single Submission berbasis Resiko bisa lebih mengeratkan hubungan antar OPD teknis.

Kelima, sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bima untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Kota Bima, Februari 2023

Kepala Dinas

H. LALU SUKARSANA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196607041986081003